

Pendidikan Kolonial di Hindia Belanda: Akar Lahirnya Elit Pribumi Nasionalis

**Heri Agung Ramdani¹ Alpha Bestly Sembiring² Key BJ Nababan³ Enjelika Sitorus⁴
Raymond Simamora⁵**

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: heri6000b@gmail.com¹ alphabestli1569@gmail.com² keybjhababan@gmail.com³ sitorusenjel762@gmail.com⁴ raymondsimqmora@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ambivalensi pendidikan kolonial di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Meskipun sering dianggap sebagai alat kontrol sosial, pendidikan kolonial secara tak terduga melahirkan elit pribumi yang memicu gerakan nasionalis. Melalui pendekatan historis-kritis, analisis sumber, dan kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, penelitian ini menafsirkan kaum intelektual terdidik sebagai "intelektual organik". Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi kelas dan etnis dalam pendidikan kolonial menumbuhkan kesadaran politik yang unik, yang mengarah pada generasi intelektual yang memelopori perlawanan ideologis terhadap kolonialisme. Studi ini menegaskan bahwa pendidikan, meskipun dirancang sebagai alat kekuasaan, menyimpan potensi sebagai ruang resistensi yang berkontribusi pada delegitimasi dominasi kolonial.

Kata Kunci: Pendidikan Kolonial, Elit Pribumi, Nasionalisme, Hegemoni, Hindia Belanda

Abstract

This study examines the ambivalence of colonial education in the Dutch East Indies during the early twentieth century. Although often regarded as an instrument of social control, colonial education unexpectedly gave rise to an indigenous elite that fueled nationalist movements. Using a historical-critical approach, source analysis, and Antonio Gramsci's theory of hegemony, this research interprets the educated intellectuals as "organic intellectuals." The findings show that class and ethnic discrimination within the colonial education system fostered a distinctive political consciousness, leading to a generation of intellectuals who spearheaded ideological resistance to colonialism. This study underscores that education, even when designed as a tool of domination, contains the potential to serve as a space of resistance that contributed to the delegitimization of colonial rule.

Keywords: Colonial Education, Indigenous Elite, Nationalism, Hegemony, Dutch East Indies



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan kolonial di Hindia Belanda merupakan salah satu instrumen politik yang dirancang bukan semata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pribumi, tetapi lebih jauh untuk menopang kepentingan kolonial. Pemerintah Belanda menyadari bahwa sistem pendidikan bisa berfungsi ganda: mencetak tenaga kerja terampil guna melayani kebutuhan birokrasi kolonial, sekaligus memperkuat legitimasi kekuasaan melalui pembentukan pola pikir yang sesuai dengan kepentingan penjajah (Afandi, 2020). Namun, warisan pendidikan kolonial tidak pernah lepas dari persoalan diskriminasi. Akses terhadap sekolah modern terbatas pada kelompok tertentu, terutama anak-anak priyayi dan elite pribumi, sementara sebagian besar rakyat tetap berada di luar jangkauan pendidikan formal (Fakhriansyah & Patoni, 2019). Kebijakan Politik Etis yang dicanangkan pada awal abad ke-20 kerap disebut sebagai tonggak lahirnya pendidikan bagi kaum pribumi. Akan tetapi, implementasinya jauh dari merata. Di satu sisi, pemerintah kolonial memang mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi, tetapi di sisi lain tetap menegaskan garis pemisah antara Eropa, Timur Asing, dan

pribumi. Hal ini menimbulkan paradoks: akses pendidikan terbuka, namun tetap bersifat diskriminatif dan eksklusif (Nurhakim, 2024). Studi di Surabaya memperlihatkan bahwa anak-anak pribumi yang dapat mengenyam pendidikan modern hampir selalu berasal dari kalangan elit, sehingga pendidikan kolonial justru mempertegas kesenjangan sosial antara priyayi dan rakyat jelata (Prayudi, 2013).

Keterbatasan ini sejalan dengan analisis Frankema (2013) yang menilai warisan pendidikan Belanda di Hindia relatif lemah dibanding koloni Eropa lain. Keterlambatan ekspansi sekolah, keterbatasan anggaran, dan kebijakan diskriminatif membuat pendidikan kolonial gagal menjadi fondasi pembangunan pendidikan massal. Dengan kata lain, pendidikan kolonial bukan proyek pencerahan universal, melainkan investasi terbatas untuk kepentingan politik dan ekonomi kolonial. Namun, justru dalam ruang terbatas itulah terjadi kontradiksi. Pendidikan kolonial tidak hanya menghasilkan pegawai rendah atau birokrat kelas menengah, tetapi juga melahirkan sekelompok kecil elit pribumi yang menguasai bahasa, ilmu, dan budaya Eropa. Kaum terdidik ini, alih-alih tunduk sepenuhnya pada tatanan kolonial, justru menjadi motor kebangkitan nasional. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pendidikan kolonial bersifat ambivalen: di satu sisi alat kontrol, di sisi lain pemicu kesadaran politik baru. Untuk memahami ambivalensi tersebut, teori hegemoni Antonio Gramsci memberi kerangka analisis yang relevan. Menurut Gramsci, kekuasaan tidak semata dipertahankan dengan kekerasan, tetapi juga melalui hegemoni, yakni dominasi ideologis yang membuat kelompok tertindas menerima tatanan sosial sebagai sesuatu yang wajar. Siswati (2019) menekankan bahwa konsep hegemoni Gramsci berpijak pada dua pilar: *political society* (aparatus koersif negara) dan *civil society* (institusi sosial dan budaya, termasuk pendidikan). Dalam konteks ini, sekolah dapat dipandang sebagai arena hegemoni, tempat nilai dan budaya kelas dominan ditanamkan secara sistematis. Namun, Gramsci juga menyoroti peran *intelektual organik*, yakni kelompok terdidik dari kelas tertindas yang mampu mengartikulasikan kepentingan kolektif dan menantang hegemoni kelas dominan (Yahya, 2018).

Pendidikan kolonial di Hindia Belanda memperlihatkan ironi tersebut. Meski dirancang untuk membentuk loyalitas kepada pemerintah kolonial, justru dari sekolah kolonial lahir generasi intelektual pribumi yang kelak menjadi tokoh pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Soetomo, Tjipto Mangunkusumo, dan generasi STOVIA adalah contoh bagaimana sekolah kolonial melahirkan *intelektual organik* yang memimpin resistensi ideologis terhadap kolonialisme. Fenomena ini menunjukkan bahwa hegemoni selalu bersifat rapuh: dalam proses reproduksi kekuasaan justru muncul benih perlawanan. Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak membahas pendidikan kolonial dari sisi deskriptif, misalnya perkembangan kelembagaan sekolah, kebijakan pendidikan, atau pola diskriminasi kelas dan etnis (Afandi, 2020; Fakhriansyah & Patoni, 2019; Prayudi, 2013; Nurhakim, 2024). Namun, kajian yang secara kritis menafsirkan pendidikan kolonial sebagai arena hegemoni dan resistensi masih terbatas. Padahal, pendekatan ini penting bukan hanya untuk memahami dinamika kolonial, tetapi juga untuk membaca akar persoalan pendidikan di Indonesia kontemporer, seperti ketimpangan akses, dominasi kurikulum, dan marginalisasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis pendidikan kolonial di Hindia Belanda dengan perspektif hegemoni Gramsci. Fokusnya adalah bagaimana diskriminasi kelas dan etnis dalam pendidikan kolonial justru mendorong lahirnya elit pribumi nasionalis sebagai *intelektual organik* yang menantang dominasi kolonial. Dengan cara ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian pendidikan kolonial, sekaligus menawarkan pemahaman baru tentang relasi antara pendidikan, kekuasaan, dan resistensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis-kritis. Metode ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis proses sosial-historis pendidikan kolonial di Indonesia dan bagaimana diskriminasi kelas serta etnis memengaruhi kemunculan elit pribumi nasionalis. Mengacu pada Gottschalk (1975), penelitian sejarah dilakukan melalui empat tahap utama: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahapan ini diterapkan untuk menelusuri berbagai dokumen dan literatur terkait kebijakan pendidikan kolonial, akses pendidikan bagi pribumi, dan peran elit terdidik dalam pergerakan nasional. Selain Gottschalk, metode historis dalam penelitian pendidikan juga ditegaskan oleh Westberg (2025) yang menekankan pentingnya periodisasi, kontekstualisasi, dan analisis sumber dalam studi sejarah pendidikan. Pendekatan ini relevan karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menyajikan data deskriptif, tetapi juga menghubungkan dinamika pendidikan kolonial dengan struktur sosial dan politik yang melingkupinya. Jurgens (2021) menambahkan bahwa metode sosial-historis penting digunakan untuk memahami relasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, karena pendidikan selalu terkait dengan kepentingan sosial, budaya, dan politik yang dominan.

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, arsip digital, serta laporan penelitian sebelumnya. Sumber-sumber tersebut mencakup kajian tentang pendidikan kolonial di Indonesia (Afandi, 2020; Fakhriansyah & Patoni, 2019; Prayudi, 2013; Nurhakim, 2024), analisis warisan pendidikan kolonial dari perspektif internasional (Frankema, 2013), serta literatur yang menjelaskan teori hegemoni Antonio Gramsci dan relevansinya dengan pendidikan (Siswati, 2019; Yahya, 2018). Analisis dilakukan dengan menggabungkan metode sejarah dan teori kritis. Dari sisi sejarah, data yang terkumpul dikritisi untuk memastikan keotentikan dan relevansinya melalui proses kritik eksternal dan internal. Dari sisi teori, kerangka hegemoni Gramsci digunakan untuk menafsirkan temuan historis, terutama dalam melihat bagaimana pendidikan kolonial sebagai arena hegemoni dapat melahirkan intelektual organik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan pendidikan kolonial, tetapi juga menafsirkan kontradiksi internalnya yang berimplikasi pada lahirnya elit pribumi nasionalis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Kolonial: Paradoks Politik Etis

Awal abad ke-20 ditandai dengan munculnya Politik Etis (1901) yang sering dianggap sebagai titik balik dalam sejarah pendidikan di Hindia Belanda. Melalui semboyan *irigasi, emigrasi, dan edukasi*, pemerintah kolonial berusaha menampilkan diri sebagai penguasa yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat pribumi. Salah satu aspek paling menonjol dari kebijakan ini adalah perluasan kesempatan pendidikan. Pemerintah Belanda mendirikan sejumlah sekolah untuk pribumi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup sekaligus menyediakan tenaga kerja terampil bagi birokrasi kolonial (Afandi, 2020). Namun, perluasan pendidikan yang dijanjikan dalam Politik Etis tidak berjalan secara merata. Pendidikan kolonial masih sangat terbatas baik dari segi jumlah lembaga maupun dari segi akses. Sekolah-sekolah modern lebih banyak dinikmati oleh anak-anak priyayi dan elite pribumi, sementara mayoritas rakyat jelata hanya dapat mengakses sekolah desa dengan kurikulum sederhana yang difokuskan pada keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung (Nurhakim, 2024). Hal ini memperlihatkan kontradiksi: pendidikan dibuka, tetapi tidak benar-benar dimaksudkan untuk pemerataan, melainkan untuk memperkuat struktur sosial kolonial. Paradoks ini semakin jelas jika dilihat dalam konteks teori hegemoni Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, kekuasaan tidak semata-mata dipertahankan melalui paksaan, melainkan melalui upaya memperoleh *consent*

atau persetujuan dari kelompok yang dikuasai. Pendidikan kolonial, dalam kerangka ini, dapat dipahami sebagai instrumen hegemoni: ia dirancang untuk menanamkan nilai, bahasa, dan pola pikir yang mendukung legitimasi kekuasaan Belanda. Siswati (2019) menegaskan bahwa institusi pendidikan berada di ranah *civil society*, tempat ideologi dominan diproduksi dan direproduksi. Dengan demikian, kebijakan Politik Etis yang pada permukaannya tampak sebagai “kebaikan hati” kolonial, pada dasarnya adalah strategi untuk mengamankan dominasi lewat jalur ideologis. Meski demikian, kebijakan ini juga membuka celah-celah yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol. Menurut Frankema (2013), keterbatasan akses dan diskriminasi dalam pendidikan kolonial justru menciptakan paradoks yang lebih luas: di satu sisi gagal membentuk sistem pendidikan massal, tetapi di sisi lain melahirkan kelompok kecil elit terdidik pribumi. Kelompok ini kelak memainkan peran signifikan dalam merumuskan identitas nasional dan menantang hegemoni kolonial. Dengan kata lain, Politik Etis adalah proyek hegemoni yang ambivalen ia mengokohkan kekuasaan kolonial, tetapi sekaligus menyiapkan fondasi bagi resistensi di kemudian hari.

Diskriminasi Akses: Stratifikasi Etnis dan Kelas

Salah satu ciri utama pendidikan kolonial di Hindia Belanda adalah adanya stratifikasi ketat berdasarkan ras dan kelas sosial. Sistem pendidikan sengaja dirancang berlapis-lapis. Anak-anak Eropa memperoleh akses ke *Europeesche Lagere School* (ELS) dengan kurikulum setara sekolah dasar di Belanda. Untuk anak-anak Tionghoa dan kelompok Timur Asing, disediakan *Hollandsch-Chineesche School* (HCS). Sementara pribumi kebanyakan hanya dapat mengakses *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) atau sekolah desa yang kurikulumnya jauh lebih sederhana. Perbedaan jalur pendidikan ini menunjukkan bahwa pendidikan kolonial bukanlah proyek egaliter, melainkan instrumen segregasi sosial (Nurhakim, 2024). Diskriminasi tersebut juga terlihat jelas pada kasus Surabaya. Prayudi (2013) menunjukkan bahwa pendidikan kolonial di kota ini didominasi oleh kalangan priyayi dan elite pribumi. Anak-anak dari kelas bawah nyaris tidak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena keterbatasan biaya, seleksi ketat, dan pembatasan administratif. Hal ini semakin menegaskan bahwa pendidikan kolonial hanya diperuntukkan bagi segelintir orang yang dianggap layak, sementara mayoritas rakyat tetap ditempatkan dalam posisi subordinat. Fenomena ini selaras dengan analisis Gramsci mengenai bagaimana hegemoni bekerja melalui diferensiasi sosial. Menurut Gramsci, dominasi ideologis beroperasi dengan cara membagi-bagi kelompok sosial dan menciptakan hirarki di antara mereka. Dalam konteks Hindia Belanda, stratifikasi pendidikan berfungsi ganda: pertama, memastikan kebutuhan kolonial terhadap tenaga kerja terdidik terpenuhi tanpa memberikan ancaman dari massa pribumi; kedua, membangun kesadaran semu di kalangan elite pribumi bahwa mereka “beruntung” mendapatkan pendidikan modern sehingga merasa memiliki kepentingan bersama dengan kolonial. Siswati (2019) menyebut mekanisme ini sebagai bagian dari kerja *civil society*, di mana institusi pendidikan menjadi saluran hegemoni untuk menciptakan persetujuan dari kelompok yang didominasi. Dengan demikian, diskriminasi akses pendidikan kolonial bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi strategi ideologis untuk mengontrol struktur sosial. Namun, seperti halnya kebijakan Politik Etis, sistem ini menyimpan kontradiksi internal. Dalam upaya memisahkan rakyat jelata dari elit pribumi, pendidikan kolonial justru memberi ruang terbatas bagi sebagian elit untuk menyerap ilmu pengetahuan modern dan menumbuhkan kesadaran politik. Diskriminasi yang dimaksudkan untuk memperkokoh hegemoni, pada akhirnya melahirkan kondisi yang memungkinkan munculnya generasi intelektual organik dari kalangan pribumi.

Ambivalensi: Pendidikan sebagai Arena Kontrol dan Peluang

Meskipun pendidikan kolonial dirancang untuk memperkuat dominasi Belanda, kenyataannya ia juga membuka peluang yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah HIS, MULO, AMS, hingga STOVIA memang berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi pada saat yang sama menjadi pintu masuk bagi generasi muda pribumi untuk mengakses pengetahuan modern, bahasa Belanda, dan nilai-nilai baru yang melampaui kerangka kolonial. Hal ini menunjukkan adanya ambivalensi: pendidikan kolonial adalah alat kontrol sekaligus saluran bagi tumbuhnya kesadaran kritis (Afandi, 2020; Fakhriansyah & Patoni, 2019). Frankema (2013) mencatat bahwa dibandingkan dengan koloni lain, Belanda cenderung lebih lambat dan lebih hemat dalam memperluas pendidikan bagi pribumi. Kebijakan ini didasarkan pada kalkulasi politik dan ekonomi, di mana pemerintah kolonial khawatir pendidikan yang terlalu luas justru memicu instabilitas. Namun, ironisnya, meskipun pendidikan kolonial terbatas, justru dari ruang sempit itulah muncul kelompok kecil pribumi yang mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi. Keterbatasan ini menciptakan paradoks: jumlahnya sedikit, tetapi dampaknya besar. Dalam kerangka teori Gramsci, ambivalensi ini dapat dipahami sebagai ciri khas dari proyek hegemoni. Hegemoni tidak pernah mutlak; ia selalu mengandung potensi resistensi. Pendidikan, yang pada awalnya diposisikan sebagai alat untuk menanamkan kesadaran kolonial, justru menjadi medan dialektis di mana wacana kolonial dapat dipelajari sekaligus dipertanyakan. Siswati (2019) menegaskan bahwa dalam *civil society*, hegemoni bisa dipatahkan melalui munculnya kesadaran alternatif. Dalam konteks Hindia Belanda, kesadaran alternatif itu mulai tumbuh di kalangan siswa dan lulusan sekolah kolonial yang menyadari keterbatasan akses pendidikan dan ketidakadilan sosial. Ambivalensi ini menjelaskan mengapa pendidikan kolonial menghasilkan dampak yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia meneguhkan struktur sosial kolonial melalui diskriminasi akses. Di sisi lain, ia justru memperkenalkan seperangkat pengetahuan, bahasa, dan nilai yang menjadi modal bagi sebagian kecil pribumi untuk menantang tatanan yang ada. Dengan demikian, pendidikan kolonial bukan hanya arena kontrol, tetapi juga arena peluang, tempat benih resistensi ditanam secara tidak sengaja oleh kolonial itu sendiri.

Lahirnya Elit Pribumi Nasionalis sebagai Intelektual Organik

Dari ruang pendidikan kolonial yang terbatas, muncul generasi kecil elit pribumi yang kelak memainkan peran penting dalam pergerakan nasional. Institusi seperti STOVIA di Batavia dan sekolah menengah di kota-kota besar menjadi wadah pembentukan intelektual pribumi yang berbeda dari rakyat kebanyakan. Mereka menguasai bahasa Belanda, memahami ilmu pengetahuan modern, sekaligus memiliki kemampuan berorganisasi. Tokoh-tokoh seperti Soetomo, Tjipto Mangunkusumo, dan Raden Dewi Sartika adalah contoh dari generasi yang memanfaatkan pendidikan kolonial untuk membangun kesadaran baru akan posisi mereka dalam struktur sosial Hindia Belanda (Afandi, 2020; Fakhriansyah & Patoni, 2019). Meskipun awalnya dirancang untuk mencetak tenaga kerja kolonial, sekolah-sekolah ini justru menghasilkan lulusan yang berani mempertanyakan legitimasi kekuasaan Belanda. Pendirian Budi Utomo tahun 1908 yang dipelopori oleh mahasiswa STOVIA menandai transformasi kaum terdidik pribumi menjadi motor kebangkitan nasional. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pendidikan kolonial, yang semula diarahkan untuk kepentingan kolonial, justru melahirkan aktor-aktor politik baru yang menentang struktur kolonial itu sendiri.

Dalam perspektif Gramsci, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *intelektual organik*. Gramsci membedakan antara *intelektual tradisional*, yang cenderung mempertahankan status quo, dengan *intelektual organik*, yakni kelompok terdidik yang lahir

dari kelas tertindas dan berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan kolektif mereka (Siswati, 2019; Yahya, 2018). Kaum terdidik pribumi yang muncul dari sekolah kolonial tidak sepenuhnya menjadi intelektual tradisional yang tunduk pada ideologi kolonial. Sebaliknya, mereka menjelma sebagai intelektual organik yang berakar pada pengalaman rakyat tertindas, lalu menggunakan pengetahuan modern untuk menantang dominasi kolonial. Lahirnya elit pribumi nasionalis ini menegaskan bahwa proyek hegemoni kolonial memiliki batas. Pendidikan memang berhasil mencetak pegawai dan birokrat yang setia pada kolonial, tetapi pada saat yang sama, ia juga melahirkan generasi intelektual yang menjadi jembatan antara kelas bawah dengan ide-ide modern tentang kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Generasi ini menjadi penggerak organisasi modern, dari Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Jong Java, yang memperluas ruang resistensi terhadap kolonialisme. Dengan demikian, pendidikan kolonial dapat dipahami sebagai arena yang kontradiktif: ia adalah instrumen dominasi yang pada akhirnya membuka jalan bagi lahirnya resistensi. Inilah titik di mana teori hegemoni Gramsci menemukan relevansinya: hegemoni tidak pernah total, dan dalam upaya mempertahankan dominasi, selalu ada ruang bagi munculnya kesadaran kritis yang berpotensi menggulingkan kekuasaan.

Diskusi Kritis: Relevansi Historis untuk Pendidikan Kontemporer

Kajian terhadap pendidikan kolonial di Hindia Belanda bukan sekadar membuka kembali catatan sejarah, tetapi juga memberi pemahaman kritis tentang akar persoalan pendidikan di Indonesia kontemporer. Sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif meninggalkan warisan struktural yang jejaknya masih terasa hingga kini. Ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, dominasi kurikulum yang berorientasi pada kepentingan kelompok elite, serta marginalisasi kelompok sosial tertentu merupakan persoalan yang dapat ditelusuri hingga era kolonial (Afandi, 2020; Fakhriansyah & Patoni, 2019). Frankema (2013) menegaskan bahwa keterbatasan investasi kolonial dalam pendidikan massal mengakibatkan lemahnya fondasi pendidikan di Indonesia pasca-kemerdekaan. Kondisi ini menjelaskan mengapa hingga kini pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memperluas akses pendidikan yang merata. Dengan kata lain, warisan kolonial tidak hanya berhenti pada masa lalu, tetapi terus berimplikasi pada bentuk dan arah pendidikan nasional. Dalam perspektif Gramsci, fenomena ini memperlihatkan bahwa sekolah tetap menjadi arena hegemoni hingga hari ini. Negara dan elit politik masih menggunakan pendidikan sebagai sarana pembentukan kesadaran dan reproduksi ideologi. Namun, sebagaimana yang terjadi pada masa kolonial, pendidikan juga menyimpan potensi resistensi. Inisiatif pendidikan alternatif, gerakan literasi, hingga kritik terhadap kurikulum menunjukkan bahwa ruang untuk melahirkan "intelektual organik" tetap terbuka. Siswati (2019) menyebut hal ini sebagai dinamika dialektis hegemoni: setiap upaya dominasi selalu memunculkan peluang resistensi. Oleh karena itu, pembacaan kritis terhadap pendidikan kolonial tidak hanya berguna untuk memahami masa lalu, tetapi juga memberi landasan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil di masa kini. Menyadari bahwa pendidikan kolonial bersifat ambivalen—sebagai alat kontrol sekaligus ruang resistensi—dapat membantu kita menempatkan pendidikan nasional bukan hanya sebagai proyek teknis, tetapi juga sebagai arena politik yang menentukan arah masa depan bangsa.

KESIMPULAN

Pendidikan kolonial di Hindia Belanda sejak awal merupakan instrumen kekuasaan yang sarat ambivalensi. Melalui Politik Etis dan sistem pendidikan berlapis, Belanda berusaha menanamkan hegemoni dengan membatasi akses pendidikan hanya pada kalangan priyayi dan elite pribumi. Kebijakan diskriminatif ini berfungsi ganda: mencetak tenaga kerja terampil

untuk kepentingan kolonial sekaligus menanamkan legitimasi ideologis di kalangan yang terdidik. Namun, strategi tersebut menyimpan kontradiksi internal. Pendidikan kolonial memang memperkuat struktur sosial yang timpang, tetapi pada saat yang sama membuka celah bagi munculnya kesadaran baru di kalangan pribumi. Dengan menguasai bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan modern, sebagian kecil lulusan sekolah kolonial tumbuh menjadi elit intelektual yang mempertanyakan legitimasi kolonial. Dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci, fenomena ini dapat dipahami sebagai kegagalan hegemoni yang bersifat mutlak. Sekolah, yang berada di ranah *civil society*, berfungsi sebagai alat dominasi ideologis, tetapi sekaligus menjadi medan dialektis tempat lahirnya *intelektual organik*. Lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional dari sekolah kolonial menunjukkan bahwa pendidikan dapat bertransformasi dari instrumen kontrol menjadi pemicu resistensi. Ambivalensi ini menegaskan bahwa setiap proyek hegemoni selalu menyisakan peluang perlawanan. Kajian ini juga memberikan refleksi bagi masa kini: ketimpangan akses pendidikan dan dominasi kurikulum yang masih terasa adalah warisan kolonial yang perlu diatasi dengan kesadaran kritis. Dengan demikian, pendidikan nasional seharusnya tidak dipandang semata sebagai sarana teknis, melainkan sebagai arena politik yang menentukan apakah bangsa ini akan terus mereproduksi ketimpangan atau justru menciptakan ruang emansipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. (2020). Pendidikan pada masa pemerintah kolonial di Hindia Belanda tahun 1900–1930. *Jurnal Artefak*, 7(1), 21–30. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>
- Endah, S. (2017). Anatomi teori hegemoni Antonio Gramsci. *Jurnal Translitera*, 5, 11–20. Universitas Islam Balitar.
- Fakhriansyah, M., & Patoni, I. R. P. (2019). Akses pendidikan bagi pribumi pada periode Etis (1901–1930). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 122–134. <https://doi.org/10.21009/JPS.082.03>
- Frankema, E. (2013). Why was the Dutch legacy so poor? Educational development in the Netherlands Indies, 1871–1942. *Masyarakat Indonesia*, 39(2), 307–332.
- Jurgens, L. K. (2021). Understanding research methodology: Social history and the Reformation period in Europe. *Religions*, 12(6), 370. <https://doi.org/10.3390/rel12060370>
- Kurniawati, Y., & Santosa, A. B. (2023). Ragam pendidikan guru masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(2), 257–276. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i2.64131>
- Nurhakim, H. A., & Fahrudin. (2024). Sistem pendidikan Hindia Belanda pada masa kebijakan politik etis. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 13(1), 52–63. <https://doi.org/10.21009/JPS.131.03>
- Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). Pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Surabaya tahun 1901–1942. *Publika Budaya*, 1(3), 20–34. Universitas Jember. <https://core.ac.uk/display/290559825>
- Westberg, J. (2025). Historical methods in educational research: Sources, contextualisation, periodisation and analysis. *Paedagogica Historica*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/00309230.2025.2473704>
- Yahya, F. A. (2017). Membangun masyarakat berdaya (Telaah atas konstruksi teori hegemoni dan intelektual organik Antonio Gramsci). *Jurnal Translitera*, 275–280. IAIN Ponorogo.